

Peradaban Islam Di Nusantara Masa Orde Baru Dan Perkembangan Pendidikan Islam

Ayu Andini¹, Moh Fathur¹, Anang Sholikhuddin¹

¹ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, Universitas Yudharta Pasuruan
*e-mail: ayu482925@gmail.com

Abstract

This study examines the dynamics of Islamic civilization in the Nusantara (Indonesian Archipelago) during the New Order era (1966-1998) and its implications for the development of Islamic education. The New Order period was characterized by contestation between state interests and Muslim aspirations in shaping national education. The method used is historical research with a qualitative-descriptive approach through literature study, policy document analysis, and review of primary and secondary sources. The findings indicate that although in the early New Order the state policy tended to marginalize political Islamic movements, over time significant accommodation toward Islam in educational policy occurred, marked by the enactment of Law No. 2 of 1989 on the National Education System and the establishment of ICMI in 1990. The transformation of madrasah from traditional institutions to modern educational institutions equivalent to public schools is an important achievement of Islamic civilization in Nusantara during this period. This study concludes that the development of Islamic education during the New Order was dialectical: on one hand subjected to state hegemony, but on the other hand it successfully utilized policy gaps to strengthen the identity and institutional framework of Islamic education.

Keywords: Islamic Civilization, Nusantara, New Order, Islamic Education, Madrasah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika peradaban Islam di Nusantara pada masa Orde Baru (1966-1998) beserta implikasinya terhadap perkembangan pendidikan Islam. Periode Orde Baru merupakan era yang sarat dengan kontestasi antara kepentingan negara dan aspirasi umat Islam dalam membentuk wajah pendidikan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian historis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan kajian pustaka primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pada awal Orde Baru kebijakan negara cenderung memarginalisasi gerakan Islam politik, namun pada perkembangannya terjadi akomodasi yang signifikan terhadap Islam dalam kebijakan pendidikan, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdirinya ICMI pada tahun 1990. Transformasi madrasah dari lembaga tradisional menuju institusi pendidikan modern yang setara dengan sekolah umum merupakan capaian penting peradaban Islam Nusantara di masa ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru bersifat dialektis: di satu sisi tunduk pada hegemoni negara, namun di sisi lain berhasil memanfaatkan celah-celah kebijakan untuk memperkuat identitas dan kelembagaan pendidikan Islam.

Kata kunci: Peradaban Islam, Nusantara, Orde Baru, Pendidikan Islam, Madrasah

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk menumbuhkan kepribadian seseorang selama hidupnya. Pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah namun dilakukan dimana saja baik berada di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha untuk melestarikan kehidupannya. Sehingga, perkembangan seseorang akan sama dengan perkembangan pendidikan sesuai pada masanya. Pendidikan adalah hal penting bagi kehidupan manusia, jika tidak ada itu manusia akan merasakan kesenjangan antar sesama dan turunnya moral seseorang. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia selalu berhubungan dengan Sejarah perkembangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan sampai saat ini (reformasi). Peran umat Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa, baik dalam perjuangan melawan penjajah maupun dalam bidang pendidikan. Karena faktanya masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dalam mencapai keberhasilannya umat muslim di Indonesia selalu berjuang dengan tulus dan ikhlas dalam membuktikan dirinya ke negeri. Diketahui bahwa sejarah pendidikan Islam memuat kebenaran dan peristiwa berkaitan dengan tumbuh dan kembangnya pendidikan baik formal serta non formal.

Pendidikan merupakan suatu pilar utama bagi bangsa yang ingin berdiri. Sebuah bangsa yang ingin maju maka harus melakukan usaha dengan rancangan yang bisa menciptakan generasi unggul melalui pendidikan. Kebijakan pemerintah dan unsur politik selalu mempengaruhi konsep pendidikan di Indonesia. Pada masa Orde Baru diterapkan sistem pendidikan yang terpusat. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sehingga tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat atau meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia ini tidak terjadi pada masa Orde Baru, tetapi justru orientasi politik diutamakan yakni supaya rakyat selalu mematuhi setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Doktrin yang diberikan pada masa Orde Baru dalam sistem pendidikan kita adalah keputusan pemerintah tidak boleh dilanggar. Penulisan ini memiliki tujuan agar pembaca dapat mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan Pendidikan Islam di era orde baru. Dengan demikian selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan yang terkait dengan Pendidikan Islam di masa mendatang agar lebih relevan dengan masanya.

Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia, tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai salah satu aspek yang penting. Dengan ilmu pengetahuan, masyarakat menjadi tercerdaskan dan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah dengan pendidikan. Sejak permulaan perkembangan Islam, aspek pendidikan menjadi prioritas masyarakat muslim di seluruh dunia, bahkan pendidikan menjadi aspek prioritas yang senantiasa diupayakan oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang. Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi Negara negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Seperti yang terjadi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dalam era global ini sangat berkembang pesat ditambah dengan teknologi yang semakin canggih dan sulit untuk dikendalikan, umat islam harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Usaha untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa terus dijalankan, walaupun dalam perjalanannya banyak masalah dan hambatan. Di antaranya timbul gerakan-gerakan yang tidak mempunyai loyalitas kepada pemerintah sehingga selalu berusaha menjegal usaha pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada Masa Orde Baru, pendidikan bukan menjadi tujuan utama. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi (termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro) menjadi ujung tombak, padahal di zaman Orde Lama ekonomi dianaktirikan.

Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar yang panjang dan kompleks, dimulai sejak masuknya agama Islam ke nusantara. Pengaruh Islam pertama kali dirasakan di pesisir Sumatra, tepatnya di Kerajaan Samudera Pasai, pada abad ke-13. Sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudera Pasai memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan dan interaksi sosial dengan pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia Pada abad ke-15 dan ke-16, Islam semakin menyebar ke berbagai wilayah nusantara, termasuk Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, melalui peran aktif para ulama dan tokoh agama. Salah satu bentuk pendidikan Islam yang awal berkembang adalah pesantren, sebuah lembaga pendidikan tradisional yang mengajarkan ilmu agama dan juga keterampilan hidup. Pesantren menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran Islam, dan hingga kini tetap menjadi institusi pendidikan yang penting di Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam terus berlanjut dengan masuknya kolonialisme Belanda pada abad ke-17. Meskipun ada upaya untuk membatasi pengaruh pendidikan Islam, masyarakat Indonesia terus mengembangkan sistem pendidikan mereka sendiri. Pada masa ini, madrasah mulai didirikan sebagai institusi formal yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum. Madrasah berbeda dari pesantren karena memiliki kurikulum yang lebih terstruktur dan terorganisir.

Membicarakan lembaga pendidikan Islam sebagai tempat berlangsungnya interaksi proses belajar mengajar. Masyarakat Islam dalam memandang lembaga pendidikan Islam, bukan merupakan institusi tunggal yang bersifat monolitik seperti yang dicitrakan media massa barat. Setelah mengalami transformasi dan modernisasi sejalan dengan perubahan sosial, politik, keagamaan dan perjumpaan budaya dengan gagasan yang bersifat global, lembaga pendidikan Islam termasuk di Indonesia, menyajikan sebuah gambaran yang kompleks. Kompleksitas tidak hanya terjadi dalam proses modernisasi yang berlangsung, tetapi juga model-model kelembagaan dan substansi pembelajaran sebagai respons terhadap modernisasi. Ungkapan Abernethy dan Coombe dalam, *education and politics*

are inextricably linked (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan). Menurutnya, hubungan timbal balik antara pendidikan dan kebijakan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (group attitudes), masalah pengangguran (un-employment), dan peranan politik kaum cendekia (the political role of the intelligentsia). Keterkaitan antara pendidikan dan politik berimplikasi pada semua tataran, baik pada tataran filosofis maupun tataran kebijakan. Pernyataan tentang kebijakan politik di atas mempengaruhi kebijakan pendidikan sesuai pendapat.

Pendidikan merupakan memanusiakan manusia yang muda. Dengan kata lain pendidikan dilaksanakan oleh orang dewasa dengan usaha yang maksimal dan strategi yang tepat agar pendidikan tersebut berhasil. Implementasi pendidikan yang berlangsung di keluarga merupakan pendidikan informal, di sekolah merupakan pendidikan formal dan di masyarakat merupakan pendidikan non formal yang berlangsung dalam seumur hidup. Dan tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk menggapai tujuan akhir dari pendidikan terus dijalankan, walaupun dalam prosesnya banyak sekali tantangan dan kendala yang dihadapi. Di antaranya timbul aksi-aksi yang memberontak kepada pemerintah yang berdampak kepada terhambatnya upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ada juga kelompok-kelompok yang menyimpang dari Pancasila. Ia dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan perspektif hidup bangsa. Indonesia yaitu golongan PKI (Partai Komunis Indonesia). Meskipun dalam aksinya adalah gerakan pada bidang politik tetapi dalam realita prakteknya masuk ke dalam aspek pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan dalam pendidikan di Indonesia mengalami perubahan agar sejalan dengan kepentingan pemerintah untuk memajukan pendidikan nasional.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan historis. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, ensiklopedia, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Kajian ini membahas dinamika pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan Era Reformasi serta berbagai kebijakan pendidikan Islam yang berkembang pada masa tersebut. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan pendidikan Islam secara diakronik, yaitu menelaah perubahan dan perkembangan dari satu fase ke fase berikutnya sehingga dapat diketahui proses pertumbuhan, transformasi, dan faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini membatasi unit analisis pada tiga fokus utama, yaitu: (1) bentuk-bentuk dinamika pendidikan Islam, (2) faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika tersebut, baik yang mendukung maupun yang menghambat, serta (3) implikasi atau dampak dinamika pendidikan Islam terhadap masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembatasan tersebut dilakukan agar penelitian lebih terarah dan sistematis.

Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan paper review dan analisis isi (content analysis). Analisis isi dilakukan dengan mengacu pada teori Harold Dwight Lasswell yang meliputi unsur *who says what, in which channel, to whom, dan with what effect*. Keempat unsur tersebut digunakan untuk mengidentifikasi aktor utama pembuat kebijakan, isi kebijakan pendidikan Islam, saluran implementasi kebijakan melalui lembaga pendidikan, sasaran kebijakan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian, sedangkan sumber sekunder meliputi buku, kamus, ensiklopedia, jurnal internasional, serta berbagai karya ilmiah interpretatif dan analitis yang mendukung kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan tujuan dan ruang lingkup penelitian, mengumpulkan literatur yang relevan, mengidentifikasi serta mengklasifikasikan sumber berdasarkan fokus kajian, kemudian menelaah dan menginterpretasikan isi literatur secara deskriptif-kritis.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi dengan tahapan perumusan masalah, penentuan unit analisis, kategorisasi data, pengkodean, interpretasi data, hingga penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis, peneliti tidak hanya mendeskripsikan isi dokumen, tetapi juga menghubungkan berbagai referensi untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang mendukung argumentasi penelitian. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan

informasi dari berbagai referensi yang relevan dan terpercaya. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif-naratif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru dan Era Reformasi..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis sejak masa awal penyebaran Islam hingga masa modern. Pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan agama, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, spiritualitas, dan keterampilan sosial masyarakat. Pada fase awal, pendidikan Islam berkembang melalui lembaga nonformal seperti halaqah, surau, dan meunasah yang berfungsi sebagai pusat pengajaran agama di tengah masyarakat. Seiring perkembangan zaman, lahir lembaga pendidikan yang lebih sistematis seperti pesantren yang tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan perjuangan sosial.

Memasuki abad ke-20, pendidikan Islam mengalami transformasi yang semakin modern melalui lahirnya madrasah yang mulai mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam memperoleh perhatian lebih besar dari negara melalui pembentukan Kementerian Agama serta integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Perkembangan tersebut terus berlanjut pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi yang masing-masing memiliki karakteristik kebijakan pendidikan yang berbeda.

Istilah Orde Lama digunakan untuk menyebut sistem pemerintahan pada masa Presiden Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1945 hingga 1966. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin, yaitu sistem yang memberikan dominasi besar kepada presiden dalam pengambilan keputusan politik negara. Sebagian kalangan umat Islam menilai sistem tersebut kurang memberikan ruang bagi aspirasi politik Islam sehingga memunculkan berbagai dinamika dalam hubungan antara pemerintah dan kelompok Islam.

Setelah berakhirnya pemerintahan Soekarno, lahirlah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung selama kurang lebih tiga puluh dua tahun, yaitu dari tahun 1966 hingga 1998. Masa Orde Baru identik dengan orientasi pembangunan nasional yang terpusat dan stabilitas politik. Seluruh kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Pemerintah menyusun program pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang dimulai sejak tahun 1969.

Pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengalami dua fase hubungan antara pemerintah dan umat Islam. Pada fase awal, hubungan tersebut masih diwarnai kecurigaan dan ketegangan. Pemerintah khawatir terhadap munculnya kembali gerakan Islam politik seperti DI/TII dan pengaruh tokoh-tokoh Masyumi. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak politik Islam dibatasi, termasuk terhadap tokoh agama, media Islam, dan organisasi yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Pada periode ini, pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Namun, pada fase berikutnya hubungan pemerintah dengan umat Islam mulai membaik. Pemerintah mulai menunjukkan sikap yang lebih akomodatif terhadap Islam, ditandai dengan berbagai kebijakan dan simbol dukungan terhadap umat Islam, seperti pembangunan Masjid At-Tin dan Masjid Pancasila, pendirian Bank Muamalat Indonesia, penyelenggaraan MTQ dan Festival Istiqlal, pembentukan Harian Republika, serta lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama. Selain itu, madrasah, pesantren, dan majelis taklim mulai diakui dalam Sistem Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.

Pada masa Orde Baru juga muncul berbagai lembaga pendidikan Islam modern dan unggulan, seperti Insan Cendekia, Madania, dan sekolah Islam elit lainnya. Pemerintah turut mendukung peningkatan mutu madrasah melalui bantuan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB). Dari kebijakan tersebut lahirlah konsep madrasah model dan madrasah unggulan sebagai upaya modernisasi pendidikan Islam.

Meski demikian, pemerintah Orde Baru tetap melakukan kontrol ketat terhadap gerakan politik Islam. Pemerintah melakukan marginalisasi terhadap kelompok Islam yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas negara. Trauma politik masa lalu dan kekhawatiran terhadap munculnya negara Islam menyebabkan pemerintah berupaya melemahkan gerakan Islam ideologis. Pemerintah hanya

mengizinkan tiga kekuatan politik utama dan mewajibkan organisasi masyarakat menerima Pancasila sebagai asas tunggal melalui kebijakan politik tahun 1980-an. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai respons dari organisasi Islam, mulai dari menerima, menerima dengan terpaksa, hingga menolak secara terbuka.

Dalam bidang pendidikan, salah satu persoalan utama pendidikan Islam pada masa Orde Baru adalah dikotomi pendidikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Pendidikan Islam sering dipandang berada di luar arus utama pendidikan nasional sehingga kualitas dan posisinya tertinggal dibanding sekolah umum. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan pembaruan madrasah.

Kebijakan penting pada masa ini adalah keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975 yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa madrasah memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah umum dengan komposisi kurikulum 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. SKB Tiga Menteri menjadi langkah penting dalam integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional sekaligus menjaga eksistensi madrasah di tengah modernisasi pendidikan.

Pemerintah juga memberikan bantuan pembangunan dan subsidi kepada madrasah melalui program sekolah Inpres. Kebijakan ini mendorong berkembangnya madrasah di berbagai daerah, meskipun pada saat yang sama sekolah Inpres juga menjadi pesaing bagi madrasah karena biaya pendidikan yang lebih murah dan fasilitas yang lebih baik. Akibatnya, banyak madrasah yang kemudian dinegerikan agar memperoleh dukungan pemerintah dalam pengelolaan dan pembiayaan.

Memasuki Era Reformasi tahun 1998, pendidikan Islam kembali mengalami perubahan signifikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan kurikulum berbasis nilai lokal dan keislaman sesuai kebutuhan masyarakat daerah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin memperkuat posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama diwajibkan pada seluruh jenjang pendidikan, baik di sekolah umum maupun madrasah. Pesantren juga mulai memperoleh pengakuan yang lebih luas dan mampu mengembangkan sistem pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum.

Dinamika pendidikan Islam pada masa Orde Baru hingga Era Reformasi menunjukkan adanya proses perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan kebijakan negara. Pendidikan Islam berkembang dari sistem tradisional menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi dengan pendidikan nasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pendidikan Islam tetap mampu bertahan dan bertransformasi sesuai perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Peradaban Islam di Nusantara pada masa Orde Baru mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah pada masa tersebut menunjukkan adanya upaya integrasi antara pendidikan nasional dan pendidikan Islam melalui pengakuan terhadap keberadaan madrasah, pesantren, serta lembaga pendidikan Islam lainnya. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi yang memberikan legitimasi dan ruang berkembang bagi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Di sisi lain, masa Orde Baru juga memperlihatkan adanya kontrol politik yang cukup kuat terhadap aktivitas keagamaan dan lembaga pendidikan Islam. Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan modernisasi yang berlangsung di Indonesia. Pesantren dan madrasah mulai melakukan pembaruan kurikulum dengan memadukan ilmu agama dan ilmu umum sehingga menghasilkan lulusan yang lebih kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru turut memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan karakter masyarakat Muslim di Nusantara. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu agama, tetapi juga menjadi media pembinaan moral, budaya, dan identitas keislaman bangsa Indonesia. Dengan demikian, masa Orde Baru dapat dipahami sebagai periode penting dalam transformasi pendidikan Islam menuju sistem yang lebih modern, terstruktur, dan diakui secara nasional, meskipun tetap menghadapi berbagai tantangan dalam aspek kebebasan dan independensi lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Lukis. "Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Baru dan Reformasi." *Ruhana: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2020). Amin, Husain Ahmad. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*. Cet III: Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1999.
- Hanipudin, Sarno. "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa." *Matan : Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (2019).
- Hartono, Yudi. "Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6, no. 1 (2016).
- Ichsan, Yazida. "Implikasi Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Orde Lama, Baru, Dan Reformasi." *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2021).
- Marlina. "Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004." *Indonesian Journal of History Education* 4, no. 1 (2016).
- Masykur, Mohammad Rizqillah. "Sejarah Perkembangan Madrasah Di Indonesia." *Jurnal Al- Makrifat* 3, no. 2 (2018).
- Oesman, Moerad. *Sejarah Perkembangan Fikiran Dalam Islam: Sosial, Politik, Aqidah, Syari'at*. Ujungpandang, 1981.
- Putra, Okto Dellon Sunuraz. Orde Baru. Kemdikbud RI, 2019. Retrieved February 1, 2022. Saputra, Fedry. "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2021).
- Yansah, Alrudi. "Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam di Masa Orde Baru." *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2016)
- Azis Thaba, Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press
- Azra, Azyumardi. 2012. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Cipta, E. S., Husaeni, A. S., Cahyati, C., & Anwar, F. (2023). Analisis Pengaruh Media Digital terhadap Perkembangan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 4(3), 109–115. <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i3.271>
- H Asrohah, 2005. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hidayati, O., Fitri, A., & Dewi, E. (2024). Pembaharuan Pendidikan Pesantren menurut KH. Imam Zarkasyi dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 297–307. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.544>
- Ida Zahara Adiba, 2020. *dinamika lembaga pendidikan islam di indonesia pada masa orde baru (1966-1998)*, *Jurnal Inspirasi* Vol.4 No.2
- Irvan, I. A., & Sirozi, M. (2024). Prinsip-Prinsip Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Sistem Pendidikan Islam. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(3), 415– 425. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i3.557>
- Muhammad Sholeh Hoddin, 2020. *Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi*. *Jurnal Ilmiah Iqra' Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado* Volume 14 Nomor 1
- Nizar, Samsul. 2007, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Nugroho, Riant, 2008, *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Raharja, A. D., & Nurachadija, K. (2023). Peran Sekolah Islam Terpadu dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 3(1), 10–15. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v3i1.240>
- Ridiana, P., & Sirozi, M. (2024). Tahapan Perencanaan Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 342–350. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.571>
- Ritonga, M. M. N. ., & Halimah, S. (2023). Analisis Kemampuan Guru PAI dalam Merancang Media Pembelajaran Berbasis Digital di MAN 1 Medan. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 4(1), 29–32. <https://doi.org/10.54371/ainj.v4i1.234>
- Rossi, *Pendidikan Islam Masa Orde Baru*, <http://coretan-rossi.blogspot.com/2011/06/pendidikan-islam-masa-orde-baru.html>, (diakses 11 Oktober 2024)
- Saridjo, Marwan. 2010. *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: PT Penamadani

- Yuniarti, N. F., & Sirozi, M. . (2024). Perencanaan Berbasis Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 5(3), 336– 341. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.568>
- Yuningsih, Heni, 2015 Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru, *Jurnal Tarbiyah* Volume: 1 No: 1
- Zuhairini, 2006. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhdi, Muhammad. 2006, 'Political and Social Influences on Religious School: A Historical Perspective on Indonesian Islamic School Curricula' McGill University Canada. <http://journal.ainarapress.org/index.php/ainj>.